OPEN ACCESS

Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota

Vol. 16, No. 4, 2020, 300-313

P-ISSN: 1858-3903 and E-ISSN: 2597-9272 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/index

ANALISIS KESIAPAN MASYARAKAT KECAMATAN SEPAKU DAN SAMBOJA TERHADAP RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA

ANALYSIS OF COMMUNITY READINESS IN KECAMATAN SEPAKU AND SAMBOJA TOWARDS RELOCATION OF THE NATIONAL CAPITAL CITY OF INDONESIA

Maulida Rachmalia Dewi 1a, Elin Diyah Syafitri 1b, Ajeng Nugrahaning Dewanti 1b

¹Institut Teknologi Kalimantan; Institut Teknologi Kalimantan; amaulidard22@gmail.com; belindiyahs@lecturer.itk.ac.id; cajengnd@lecturer.itk.ac.id

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 21 Agustus 2020
- Artikel diterima: 15 Desember 2020
- Tersedia Online: 30 Desember 2020

ABSTRAK

Pemindahan ibu kota negara adalah salah satu pembangunan nasional yang memberikan dampak serta manfaat positif ke masyarakat didalamnya. Hasil berkelanjutan pada pembangunan nasional dapat terjadi apabila masyarakat terlibat aktif dalam pembangunannya. Keterlibatan masyarakat memiliki kaitan dengan kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Apabila masyarakat tidak siap dalam menghadapi pembangunan, maka dapat mempengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri. Kondisi nilai tertinggi tingkat kesiapan masyarakat dalam menghadapi isu adalah masyarakat telah dilibatkan dalam upaya dan mampu mengevaluasi program kesiapan yang telah disusun. Namun, belum diketahui kondisi kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja terhadap pemindahan ibu kota negara. Analisis tingkat kesiapan masyarakat menggunakan teknik analisis community readiness model. Diketahui bahwa nilai akhir tingkat kesiapan masyarakat di Kecamatan Sepaku adalah 3 (vague awareness) dan di Kecamatan Samboja adalah 2 (denial/ resistance).

Kata Kunci: Kesiapan Masyarakat; Masyarakat; Pemindahan Ibu Kota Negara;

ABSTRACT

The relocation of the national capital is national development that has a positive impact and benefits on the people in it. Sustainable results in national development can occur if the community is actively involved in its development. Community involvement is related to the community readiness in Kecamatan Sepaku and Samboja in dealing with the relocation of the Indonesia"s national capital. If the community is not ready, it can affect the condition of the community itself. The highest level of community readiness in dealing with issues is that the community involved and able to evaluate the program that has been prepared. However, the condition of the community in Kecamatan Sepaku and Kecamatan Samboja is not yet known towards the planned relocation of the national capital. Therefore, this study aims to analyze the level of readiness of Kecamatan Sepaku and Kecamatan Samboja towards of the relocation of the national capital. Analysis of the level of community readiness using the community readiness model. It is known that the final value of the community readiness in Kecamatan Sepaku is 3 (vague awareness) and in Kecamatan Samboja is 2 (denial / resistance).

Keyword: Community Readiness; Community; Relocation of National Capital City;

Copyright © 2020 JPWK-UNDIP

 $This \ open \ access \ article \ is \ distributed \ under \ a \ Creative \ Commons \ Attribution \ (CC-BY-NC-SA) \ 4.0 \ International \ license.$

1. PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pembangunan. Pemindahan ibu kota negara dapat dilakukan dengan alasan adanya pembangunan negara, pembangunan skala regional, mitigasi, keputusan pemimpin serta isu negara tersendiri (Illman, 2015). Pembangunan

nasional di dalam negara demokrasi pada dasarnya dilakukan oleh kemauan, kemampuan dan kebutuhan rakyatnya (Bappenas, 2009). Pembangunan pun dilakukan secara mandiri oleh masyarakat karena masyarakat yang merasakan manfaat dan dampak adalah masyarakat itu sendiri. Hal ini menyatakan bahwa adanya keterlibatan masyarakat memberikan dampak dalam pembangunan, khususnya dalam pemindahan ibu kota negara.

Dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, perlu diketahui tingkat kesiapan masyarakat. Kesiapan merupakan kondisi individu untuk siap memberikan respon dalam situasi dan kondisi. Menurut Plested (2006), tingkat kesiapan secara umum dapat diukur melalui tingkat pengetahuan, peran pemimpin, bentuk upaya dan sumberdaya yang ada di masyarakat. Apabila kondisi masyarakat yang tidak siap dari kriteria tersebut, tentu dapat mempengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri. Namun, ketika masyarakat mampu mempersiapkan dirinya, pembangunan yang ada dapat dijadikan media untuk mengembangkan kondisi masyarakat baik di bidang pendidikan, peningkatan ekonomi dan lainnya.

Pemindahan ibu kota negara akan dilakukan di negara Indonesia. Pada bulan Agustus 2019 lalu, dalam pidato resmi Presiden Jokowi, beliau telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Guna meminimalisir permasalahan yang terjadi akibat pemindahan ibu kota negara, maka perlu diketahui tingkat kesiapan masyarakat di lokasi ibu kota negara baru. Menurut pemaparan pada diskusi Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Lembaga Bumi, Aliansi Organisasi Masyarakat Daerah Kalimantan Timur menyatakan bahwa, masyarakat berharap adanya perbaikan pendidikan. Selain itu, masyarakat ingin terlibat dalam kegiatan ibu kota negara yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi sedangkan, kualifikasi tersebut hanya dapat dipenuhi oleh sebagian kecil masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki daya saing dan masyarakat dapat menikmati dampak positif pemindahan ibu kota negara baru. Jika dilihat jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, menurut Profil Kecamatan Samboja (2019), diketahui bahwa latar belakang pendidikan masyarakat didominasi oleh tamatan SD sebesar 487 jiwa. Hal ini mendorong masyarakat mengharapkan adanya pengembangan di bidang pendidikan untuk mendukung pemindahan ibu kota negara.

Kondisi pendidikan dan pernyataan masyarakat mengenai rencana pemindahan ibu kota negara masih belum dapat menjelaskan kesiapan masyarakat secara keseluruhan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, perlu adanya analisis terhadap kondisi kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja sebagai pengetahuan terkait kesiapan masyarakat pada lokasi studi terkait pemindahan ibu kota negara. Hal ini tentunya berguna sebagai bahan pertimbangan masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja untuk menyusun upaya mempersiapkan diri dalam meningkatkan kesiapan masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara.

2. DATA DAN METODE

Data yang dibutuhkan dalam penelitian berupa persepsi masyarakat terkait rencana pemindahan ibu kota negara berdasarkan dimensi kesiapan masyarakat yang merujuk pada Barbara A. Plested, Ruth W.Edwards dan Pamela Jumper Thurman dalam Community Readiness: A Handbook for Successful Change Tahun 2006. Dimensi yang digunakan adalah Upaya Masyarakat (A), Pengetahuan Masyarakat Terhadap Upaya (B), Kepemimpinan (C), Community Climate (D), Pengetahuan Masyarakat Terhadap Isu (E) dan Sumber Daya yang Berkaitan Dengan Isu (F). Hasil kuisioner di rekap menjadi individual scores dan combined scores (Plested, 2006). Dilakukan perhitungan skor gabungan dengan membagi total combined scores dengan jumlah sampel. Tahapan terakhir adalah skor gabungan dibagi dengan jumlah dimensi yaitu 6 untuk menghasilkan nilai tingkat kesiapan secara keseluruhan. Nilai tersebut dapat diinterpreasikan menggunakan nilai tingkat kesiapan menurut Plested Tahun 2006. Berikut adalah sembilan tahapan kesiapan masyarakat (Plested, 2006):

Tabel 1. Tingkat Kesiapan Masyarakat

Skor	Tingkatan Kesiapan Masyarakat		
1	No Awareness		
2	Denial/ Resistance		
3	Vague Awareness		
4	Preplanning		
5	Preparation		
6	Initiation		
7	Stabilization		
8	Confirmation		
9	High Level of Community Ownership		

Sumber: Plested, 2006

Tabel 2. Interpretasi Nilai Tingkat Kesiapan

Nilai	Dimensi A	Dimensi B	Dimensi C	Dimensi D	Dimensi E	Dimensi F
1	Sama sekali tidak memiliki tingkat partisipasi, tidak ada kebijakan dan tidak tahu mengenai kepedulian	mencari tahu mengenai	Tidak ingin mencari tahu mengenai ketersediaan peran pemimpin	Tidak ingin mencari tahu kekhawatiran terhadap rencana pemindahan, tentang tingkat kesadaran/ kepedulian dalam mempersiapkan diri	mencari tahu mengenai rencana	Tidak ada tenaga ahli, bantuan dana dan alokasi waktu
2	sama sekali tidak	tahu	Sama sekali tidak tahu mengenai ketersediaan peran pemimpin dan kemampuan dalam motivasi dan mempengaruhi	kesadaran/ kepedulian	Sama sekali tidak tahu mengenai informasi pemindahan. Tidak tahu mengakses informasi dimana dan tidak mencari tahu	
3	Sudah mulai terpikirkan mengenai upaya tapi tidak peduli mengenai mempersiapkan diri	Tidak tahu mengenai informasi upaya	tidak ada peran pemimpin,sama sekali tidak	Tidak khawatir karena tidak merasa berdampak terhadap rencana pemindahan, Tidak peduli dan tidak ada usaha dalam mempersiapkan diri	tidak berdaya mengenai rencana pemindahan	

Nilai	Dimensi A	Dimensi B	Dimensi C	Dimensi D	Dimensi E	Dimensi F
4	Mulai sadar karena ada sosialisasi mengenai upaya dengan tingkat kepedulian biasa saja	Tidak ada informasi mengenai upaya	Mungkin ada peran pemimpin,Tidak termotivasi dan tidak terpengaruh	rencana pemindahan ibu kota negara, Sedikit kepedulian tapi tidak ada usaha mengenai tingkat kesadaran/	mengenai pemindahan. Mulai mencari tahu informasi lebih lengkap	
5	Ada pro dan kontra terhadap partisipasi .Kebijakan tersedia namun tidak disosialisasikan dan tidak direalisasikan. Mulai muncul kepedulian	informasi upaya tapi tidak ada sumber	pemimpin	hambatan dalam pelaksanaan upaya dan mendapat informasi. Ingin berkontribusi	mengenai informasi rencana pemindahan tanpa ada	Tenaga ahli ada tapi tidak kompeten. Bantuan dana dan alokasi waktu ada tapi tidak cukup.
6	Mulai berpartisipasi terhadap upaya tetapi tidak terlalu aktif Muncul kepedulian, tidak aktif dan belum ada rasa tanggung jawab	Ingin mencari tahu mengenai upaya	Ada peran pemimpin tetapi tidak aktif, mulai termotivasi dan terpengaruh	Sedikit khawatir terhadap rencana pemindahan ibu kota negara, Mulai peduli dan mulai sadar dalam mempersiapkan diri terhadap rencana pemindahan. Hanya memberikan kontribusi berupa hadir saat diperlukan.	Mulai mencari tahu informasi lebih lengkap manfaat. Sudah tahu informasi sedikit, akses terbatas dan berusaha mencari sumber lain.	
7	Partisipasi berjalan dengan pemberian bantuan untuk mendukung upaya Cukup peduli, cukup aktif dan cukup bertanggung jawab	informasi	cukup	Cukup khawatir terhadap rencana pemindahan ibu kota negara, Cukup peduli, tidak sadar dan mulai mendiskusi kan upaya. Cukup aktif dalam berkontribusi dan pasif mengajak masyarakat lain	upaya. Mulai tahu mengenai informasi dan manfaat adanya pemindahan ibu	

Nilai	Dimensi A	Dimensi B	Dimensi C	Dimensi D	Dimensi E	Dimensi F
8	Upaya baru Sangat peduli, tidak terlalu aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya	Cukup tahu mengenai info dan kelemahan serta kekuatan upaya.	Ada peran pemimpin, aktif, cukup berkompeten tetapi belum mempengaruhi, terpengaruh dan termotivasi dan melibatkan diri	merencanakan upaya. Sangat aktif dalam	Tahu mengenai informasi, manfaat dan dampak dan mulai mewujudkan upaya. Mulai dilibatkan dalam rencana upaya. Akses info mudah	
9	Aktif dalam berpartisipasi dan upaya yang ada banyak. Kebijakan tersedia, dan berjalan/ akan berjalan. Sangat peduli, aktif dan bertanggung jawab dalam melaksanakan upaya	Sangat tahu mengenai informasi upaya.	Pemimpin, aktif, cukup berkompeten dan mampu mempengaruhi, sangat termotivasi dan sangat terpengaruh serta aktif terlibat. Program yang direncanakan beragam	hambatan dalam pelaksanaan upaya dan mendapat informasi. Sangat aktif dalam	informasi yang ada dilibatkan dalam rencana	ada dan berkompeten. Bantuan dana dan alokasi

Sumber: Olahan Penulis, 2020

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis tingkat kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja terhadap rencana pemindahan ibu kota Negara dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi masyarakat menggunakan dimensi kesiapan. Dimensi kesiapan yang dimaksud berupa dimensi upaya masyarakat, dimensi pengetahuan terhadap upaya, dimensi kepemimpinan, dimensi iklim komunitas, dimensi pengetahuan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara dan dimensi sumber daya yang berkaitan dengan isu. Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut:

3.1 Tingkat Kesiapan Masyarakat Berdasarkan Dimensi Upaya Masyarakat

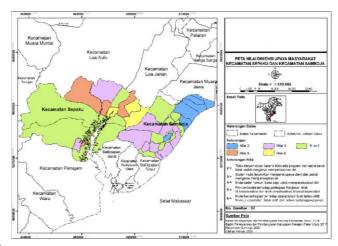
Variabel yang digunakan untuk mengukur dimensi upaya masyarakat didapatkan melalui sintesa teori. Menurut Hastuti (2011), upaya masyarakat salah satunya dapat diketahui melalui tingkat partisipasi masyarakat terhadap upaya untuk menghadapi isu. Menurut Lailia (2014), upaya masyarakat salah satunya juga dapat diukur melalui ketersediaan kebijakan untuk mendukung upaya. Ditambah oleh Kurniati (2015), tingkat kepedulian pun termasuk variabel yang dapat diukur untuk mengetahui dimensi upaya masyarakat. Perlu diketahui bahwa upaya yang dimaksud perlu menyesuaikan tujuan yang akan dicapai. Bentuk upaya yang dimaksud seperti sosialisasi, program yang mendukung tujuan atau adanya kebijakan pemerintah.

Menurut kuisioner dan wawancara, masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja tidak memiliki tingkat partisipasi karena tidak adanya program dan kebijakan untuk peningkatan kesiapan. "Sampai sekarang masih belum ada program untuk masyarakat" (SP – R15, Wawancara, Februari 2020). Terkait kepedulian dalam mempersiapkan diri, masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja merasa

tidak peduli serta biasa saja dengan adanya rencana pemindahan ibu kota negara. Oleh karena itu, penilaian dimensi upaya masyarakat terhadap lokasi studi termasuk nilai 2.

Terdapat pula masyarakat Kecamatan Samboja yang memiliki tingkat partisipasi terhadap upaya mempersiapkan diri namun tidak terlalu aktif. Masyarakat tersebut termasuk ke dalam katagori nilai 6 dan 8. Upaya yang tersedia di Kecamatan Samboja berupa bantuan pelatihan PKK dan swasta. Masyarakat Kecamatan Samboja yang memiliki partisipasi dalam kegiatan tersebut memiliki kepedulian lebih tinggi daripada masyarakat yang termasuk nilai 2. Sedangkan, pada Kecamatan Sepaku, terdapat masyarakat yang mulai peduli dan sadar akan pentingnya mempersiapkan diri yang termasuk kedalam nilai 4, nilai 5, nilai 6 dan nilai 7. Masyarakat tersebut memiliki pengetahuan mengenai rencana upaya pelatihan pelatihan melalui sosialisasi.

Dapat diketahui berdasarkan wawancara dan pengisian kuisioner, masyarakat di Kecamatan Samboja dan Kecamatan Sepaku menganggap tidak ada program atau kebijakan yang mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Seperti pada penelitian Hastuti (2011) yang menyatakan partisipasi dapat mempengaruhi upaya masyarakat, pada lokasi studi masyarakat tidak berpartisipasi karena tidak ada kebijakan upaya yang mendukung. Terkait tingkat kepedulian, masyarakat di lokasi studi memiliki tingkat kepedulian yang beragam. Disajikan peta nilai dimensi upaya masyarakat pada gambar 1. Nilai pada peta didapatkan dari hasil jawaban responden yang dibedakan tiap desa dan kelurahan pada lokasi studi. Oleh karena itu, dapat diketahui perbedaan di tiap desa dan kelurahan mengenai dimensi upaya masyarakat. Namun, secara keseluruhan, Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja termasuk ke dalam nilai 2.



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Gambar 1. Peta Nilai Dimensi Upaya Masyarakat

3.2 Tingkat Kesiapan Masyarakat Berdasarkan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Upaya

Terkait pengetahuan masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja mengenai upaya, belum mengetahui informasi sehingga, masyarakat menyatakan upaya masih belum tersedia. Pada Kecamatan Sepaku, sosialisasi mengenai upaya sebatas disampaikan melalui kepala dusun dan RT. "Sosialisasi baru disampaikan dari Lurah dan Kepala Desa masing – masing ke kepala dusun dan RT setempat. Lalu, mereka yang menyampaikan ke warga" (SP-R27, wawancara, Februari 2020). Oleh karena itu, terkait pengetahuan masyarakat, Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja termasuk kedalam katagori nilai 4.

Terdapat pula masyarakat yang sudah mengetahui mengenai upaya peningkatan kesiapan di Kecamatan Sepaku. Upaya tersebut adalah sosialiasi rencana pelatihan keterampilan atau atau ProP2KPM. Program tersebut telah direncanakan oleh pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara yang salah satu tujuannya untuk mempersiapkan masyarakat dalam mengahadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Jenis pelatihan keterampilan yang direncakan menyesuaikan dengan potensi tiap desa/ kelurahan.

Pelatihan keterampilan berupa budidaya jamur, menjahit, pelatihan kolam bioflok, hidroponik, tukang modern dan perbaikan Air Conditioner, membuat tas dan kegiatan home industry. Masyarakat dengan kondisi yang lebih mengetahui mengenai upaya termasuk ke dalam katagori nilai 5 hingga 9.

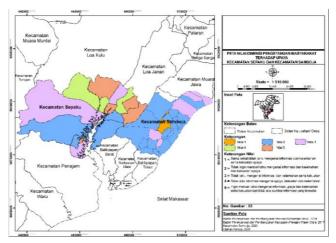
"Sudah dilaksanakan sosialisasi mengenai rencana pelatihan. Nama programnya kalau tidak salah Pro2KPM. Program ini salah satunya memang mendukung masyarakat untuk mempersiapkan diri sebelum rencana pemindahan ibu kota negara. Pelatihan yang ada disesuaikan dengan potensi desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku. Jadi, tiap desa dan kelurahan bisa berbeda jenis pelatihannya." (SP- R93, wawancara, Maret 2020)

Kelemahan dalam pelatihan keterampilan adalah kurang efektifnya waktu pelatihan, merasa kurang sesuai dengan potensi, rendahnya partisipasi, kurangnya modal dan kekhawatiran program berhenti di tengah jalan dan kurangnya tenaga berkompeten. Kekuatan adanya pelatihan keterampilan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan keterampilan masyarakat, dan perbaikan tingkat pendapatan masyarakat.

Terdapat pula masyarakat Kecamatan Samboja yang mengetahui mengenai upaya berupa sosialisasi dari kelurahan atau Bappenas mengenai pembuatan sertifikat tanah yang bertujuan untuk mendukung pemindahan ibu kota negara. Selain sosialisasi, terdapat pula pelatihan PKK dari kabupaten dan adanya pemberdayaan SDM yang diberikan oleh pihak swasta. Masyarakat tersebut termauk kedalam katagori 5 dan 7. Kekuatan upaya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat mendukung kegiatan tersebut. Kelemahan upaya adalah kurangnya dana sebagai dana bantuan dan praktik langsung yang minim.

"Ada bantuan pelatihan PKK dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pusat yang katanya untuk rencana pemindahan IKN" (SM –R71, wawancara, Maret 2020)

"Kalau upaya dari pemerintah ada, dari pihak kelurahan yang melakukan sosialisasi tentang rencana pemindahan ibu kota negara. Ada juga sosialisasi mengenai lahan dan pembuatan sertifikat tanah dari pemerintah" (SM- R54, wawancara, Februari 2020)



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Gambar 2. Peta Nilai Dimensi Pengetahuan Terhadap Upaya Masyarakat

Berdasarkan kondisi tersebut, jika dikaitkan dengan teori Plested (2006) dan Putri (2017) mengenai pengetahuan terhadap upaya, masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja memiliki kondisi nilai tingkat kesiapan masyarakat yang sama yaitu pada nilai 4. Hal ini dikarenakan sebagian besar belum mengetahui informasi dan belum ada menyusun upaya mempersiapkan diri. Masyarakat di Kecamatan Sepaku lebih banyak menganggap belum ada upaya peningkatan kesiapan. Walaupun sebenarnya sudah ada sosialisasi rencana upaya pelatihan keterampilan namun, belum tersampaikan secara merata. Sedangkan, di Kecamatan Samboja sebagian kecil masyarakat mengetahui informasi upaya yaitu pelatihan

PKK, pelatihan swasta serta sosialisasi pembuatan sertifikat tanah.Peta nilai dimensi pengetahuan masyarakat berdasarkan desa dan kelurahan tersaji pada gambar 2. Oleh karena itu, dapat diketahui perbedaan di tiap desa dan kelurahan mengenai dimensi pengetahuan upaya masyarakat. Namun, secara keseluruhan, Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja termasuk ke dalam nilai 4.

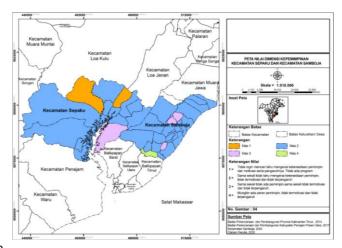
3.3 Tingkat Kesiapan Masyarakat Berdasarkan Dimensi Kepemimpinan

Peran pemimpin yang baik menurut Hardika (2013), Ramadhan (2016) dan Putri (2017) adalah pemimpin yang mampu memberikan pengaruh dan motivasi masyarakat. Dalam hal ini, mampu memotivasi dan mempengaruhi masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi pemindahan ibu kota negara. Perlu adanya pula program yang mendukung masyarakat (Hardika, 2013). Perlu diketahui bahwa peran pemimpin yang dimaksud adalah peran yang muncul dari masyarakat itu sendiri. Namun, kondisi kepemimpinan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja masih belum tersedia. Masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja tidak termotivasi dan tidak terpengaruh dalam mempersiapkan diri. Oleh karena itu, nilai dimensi kepemimpinan masyarakat Sepaku dan Samboja adalah nilai 2. Nilai ini sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadpa upaya mempersiapkan diri.

Terdapat sebagian kecil masyarakat di Kecamatan Sepaku yang merasa sudah ada pemimpin yang memberikan motivasi dan pengaruh untuk mempersiapkan diri melalui program yang disusun. Salah satu contoh program yang disusun oleh pemimpin masyarakat di Kelurahan Mentawir yaitu pengembangan wisata mangrove dan pelatihan penjualan produk mangrove. Sebagian kecil masyarakat Kecamatan Samboja merasa ada peran pemimpin namun, tidak aktif dan sebagian beranggapan sudah aktif dan mampu mengajak masyarakat. Program yang dilakukan berupa pembuatan apotik hidup.

Seperti pada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai peran pemimpin, diketahui bahwa peran pemimpin masih belum tersedia untuk membantu masyarakat dalam mempersiapkan diri. Peran pemimpin dipengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap upaya. Belum tersedianya pemimpin menyebabkan masyarakat tidak termotivasi dan tidak terpengaruh dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Nilai dimensi kepemimpinan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja termasuk ke dalam katagori nilai 2 yaitu sama sekali tidak tahu mengenai ketersediaan peran pemimpin, tidak termotivasi dan tidak terpengaruh karena peran pemimpin tidak ada.

Disajikan peta nilai dimensi kepemimpinan berdasarkan desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. Nilai pada peta menunjukkan nilai di tiap desa dan kelurahan. Namun, secara keseluruhan nilai dimensi kepemimpinan berada pada nilai 2.



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Gambar 3. Peta Nilai Dimensi Kepemimpinan

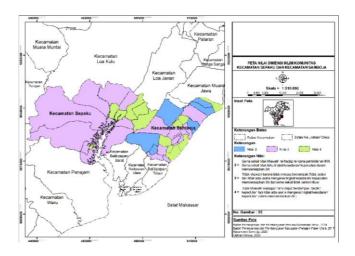
3.4 Tingkat Kesiapan Masyarakat Berdasarkan Dimensi Iklim Komunitas

Mengenai kekhawatiran terhadap rencana pemindahan ibu kota negara, Masyarakat Kecamatan Sepaku didominasi dengan katagori tidak khawatir. Masyarakat sadar akan dampak yang timbul nantinya. Tetapi kekhawatiran tersebut belum mendorong masyarakat untuk mempersiapkan diri. Kondisi ini sejalan dengan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap upaya yang mayoritas masyrakatnya menganggap belum ada upaya yang tersedia. Kondisi masyarakat Kecamatan Samboja pun didiominasi oleh masyarakat yang tidak khawatir mengenai pemindahan ibu kota negara walaupun sadar akan dampak sosial dan ekonomi yang diberikan. Namun, dengan pengetahuan mengenai upaya yang minim, masyarakat tidak tahu bentuk kontribusi yang diberikan. Oleh karena itu, nilai dimensi iklim komunitas di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja adalah 2.

Bentuk kekhawatiran masyarakat Kecamatan Sepaku adalah masalah keamanan dan keadaan sosial ataupun tingkat kenyamanan. Walaupun sudah memiliki tingkat kekhawatiran masih terdapat masyarakat yang belum ingin melakukan upaya. Masyarakat yang mulai sadar pentingnya mempersiapkan diri, biasanya adalah masyarakat yang mengetahui informasi ketersediaan upaya. Masyarakat yang mulai sadar memiliki tingkat kontribusi yang lebih baik daripada masyarakat yang menunggu terwujudnya rencana upaya pelatihan. Hambatan yang dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan upaya untuk mempersiapkan diri yaitu kurangnya dana untuk melakukan upaya, program masih dalam rencana yang seharusnya dapat dilaksankan lebih cepat dan rendahnya kualitas SDM. Masyarakat dengan kondisi tersebut masuk ke dalam katagori nilai 5,6 dan 7.

"Kekhawatiran itu pasti ada. Bisa diliat sendiri, lingkungan disini nyaman dan gak bising. Kalau sudah mulai pembangunan pasti banyak kendaraan yang sudah lalu lalang. Belum lagi nanti banyak orang baru masuk, tingkat kriminalitas pasti jadi tambah banyak kaya di Jakarta" (SP – R42, Wawancara, Februari 2020).

Terdapat pula masyarakat Kecamatan Samboja yang tidak merasa khawatir karena tidak merasa terkena dampak rencana pemindahan ibu kota negara dan tidak ingin mencari tahu mengenai informasi tersebut. Masyarakat Kecamatan Samboja yang cukup khawatir merasakan hambatan berupa akses informasi sulit dan rendahnya tingkat pendidikan masyrakat mempengaruhi kemampuan menyerap informasi dan informasi yang diperoleh sebatas lahan. Masyarakat yang merasa sangat khawatir sangat aktif dalam berkontribusi baik hadir saat dibutuhkan dan berdiskusi serta aktif untuk mengajak masyarakat lain. Disajikan peta nilai dimensi iklim komunitas berdasarkan desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. Nilai pada peta menunjukkan nilai di tiap desa dan kelurahan. Namun, secara keseluruhan nilai dimensi iklim komunitas berada pada nilai 2



Sumber: Olahan Penulis, 2020

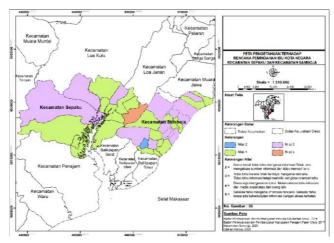
Gambar 4. Peta Nilai Dimensi Iklim Komunitas

3.5 Tingkat Kesiapan Masyarakat Berdasarkan Dimensi Pengetahuan Terhadap Isu

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner, sumber informasi mengenai rencana pemindahan ibu kota negara dapat diakses melalui media sosial atau obrolan sesama masyarakat. Namun, masih terdapat masyarakat Kecamatan Sepaku yang sama sekali tidak tahu mengenai rencana pemindahan ibu kota negara. Hal ini dikarenakan karena masyarakat tidak tahu dapat mendapatkan informasi dimana dan tidak berusaha untuk mencari tahu. Kondisi masyarakat tersebut pun berlaku pula pada masyarakat Kecamatan Samboja. Oleh karena itu, terkait tingkat pengetahuan masyarakat "Saya tidak tahu mengenai informasi pemindahan, saya kurang peduli juga sebenarnya. Karena itu urusan pemerintah" (SP – R81, wawancara, Maret 2020)

Selain mendapatkan informasi melalui media sosial, masyarakat Kecamatan Sepaku mendapat informasi mengenai hal yang berkaitan dengan rencana pemindahan ibu kota negara dari kantor desa/kelurahan namun dengan akses terbatas. Informasi yang didapat belum mampu mendorong masyarakat untuk melakukan upaya. Bentuk informasi yang diperoleh berupa lokasi ibukota akan di Kalimantan dan ditetapkan di Sepaku, *Draft* rancangan Undang- Undang mengenai pemindahan ibu kota negara, penetapan zonasi, lokasi istana negara di PT. ITCI Hutani Manunggal, adanya pembangunan jalan tol di Sisipan, kawasan titik nol dan lokasi peletakkan batu pertama. Informasi yang didapatkan belum diproses lebih lanjut sebagai latar belakang untuk melakukan upaya mempersiapkan diri oleh responden.. Terdapat perbedaan bentuk informasi yang didapatkan masyarakat Kecamatan Samboja. Informasi yang didapatkan sebatas pemindahan ibu kota negara dan tidak merasa bahwa lokasi ibu kota negara akan bersinggungan dengan Kecamatan Samboja. Adanya informasi tersebut masih belum mampu mendorong masyarakat untuk melakukan upaya mempersiapkan diri. "Banyak informasi mengenai rencana pemindahan ibu kota negara, dari hp kan bisa dibuka dan juga dapat dari grup whatsapp. Katanya nanti ada peletakkan batu pertama di Bumi Harapan sebagai tanda pembangunan IKN" (SP - R77, wawancara, Maret 2020)

Terdapat pula masyarakat Kecamatan Sepaku yang mulai dilibatkan dalam rencana upaya. Masyarakat yang dilibatkan mampu mendapatkan informasi lebih mudah dan variatif terkait pemindahan ibu kota negara. Sumber informasi yaitu diskusi ataupun sosialisasi mengenai pemindahan ibu kota negara. Ada pula masyarakat Kecamatan Samboja yang memiliki tingkat pengetahuan berupa informasi, manfaat dan dampak yang akan timbul dengan adanya pemindahan ibu kota negara. Informasi tersebut digunakan sebagai latar belakang melalukan upaya mempersiapkan diri. Akses informasi mudah didapatkan dari beragam sumber seperti kantor kelurahan/ desa. Disajikan peta nilai dimensi pengetahuan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara berdasarkan desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. Nilai pada peta menunjukkan nilai di tiap desa dan kelurahan. Namun, secara keseluruhan nilai dimensi pengetahuan terhadap rencana pemindahan ibu kota negara berada pada nilai 4.



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Gambar 5. Peta Nilai Dimensi Pengetahuan Terhadap Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara

3.6 Tingkat Kesiapan Masyarakat Berdasarkan Dimensi Sumber Daya yang Berkaitan dengan Upaya Mempersiapkan diri

Mayoritas masyarakat Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja menjawab belum adanya tenaga ahli, dana dan alokasi waktu yang diberikan sebagai bentuk bantuan untuk mempersiapkan diri. Namun, seperti yang dipaparkan sebelumnya, di Kabupaten Penajam Paser Utara sudah merencanakan adanya rencana pelatihan keterampilan. Jumlah dana Bantuan Keuangan (bankeu) untuk biaya pelatihan sebesar Rp 200.000.000 di tiap desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Masyarakat Kecamatan Sepaku yang telah mengetahui informasi tersebut memiliki beberapa anggapan yaitu dana yang diberikan masih belum cukup dan ada pula yang beranggapan dana sudah cukup. "Program upaya pelatihan diberikan anggaran dari Bankeu sebesar Rp 200.000.000. Nanti, dana nya di alokasikan selama pelatihan berlangsung. (SP – R80, wawancara Maret 2020)

Tenaga ahli yang membantu masyarakat Kecamatan Sepaku rencananya berasal dari BLK Samarinda dan Balikpapan. Terkait jumlah, masih belum diketahui. Masyarakat nantinya akan didampingi oleh tenaga pendamping desa. Terdapat bantuan dari pihak swasta pada Keurahan Mentawir terkat pengembangan pariwisata mangrove.

Mengenai alokasi waktu rencana pelatihan, jumlah alokasi waktu yang diberikan masih didalam tahap rencana yang menyesuaikan dengan tenaga ahli, jenis pelatihan dan masyarakatnya. Namun, ada pula masyarakat Kecamatan Sepaku yang menjawab alokasi waktu sebanyak satu bulan penuh. Dengan waktu yang diberikan selama satu bulan penuh, 3 kali tiap 10 minggu, 10 kali atau 4 atau 8 kali. Sama hal nya dengan pendapat masyarakat mengenai dana, terkait alokasi waktu pun masyarakat memiliki pendapat yang berbeda. Terdapat masyarakat yang merasa belum cukup dan masyarakat yang beranggapan sudah cukup membantu mempersiapkan diri.

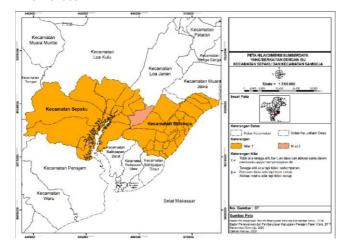
"Jumlah hari pelatihannya masih belum pasti karena masih menyusun RAB" (SP – R65, wawancara Maret 2020)

"Rencana pelatihannya ada yang 4 kali dan 8 kali" (SP – R25, wawancara Februari 2020)

Sumber daya yang berkaitan dengan isu di Kecamatan Samboja berada pada kondisi yang sama dengan Kecamatan Sepaku. Masih belum tersedia nya dana, tenaga ahli dan alokasi waktu yang mendukung upaya. Hal ini sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat Kecamatan Samboja terhadap upaya yang memang menyatakan belum ada upaya. Oleh karena itu, nilai dimensi sumber daya yang berkaitan dengan upaya di Kecamatan Samboja berada pada nilai 1.

Terdapat masyarakat yang mengetahui informasi mengenai adanya kerjasama dengan kementerian dan Dinas Kehutanan serta PKK mengenai tenaga ahli. Tenaga ahli dari PKK berjumlah 10 orang. Terdapat pula bantuan dana dari pihak swasta sebesar Rp 100.000.000. Walaupun sudah ada dana dan tenaga ahli, sebagian besar informasi mengenai alokasi waktu masih belum diketahui jumlahnya.

Berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan sumber daya, menurut Blevins (2013), Plested (2006), Kurniati (2015) dan Putri (2017), memiliki pendapat yang sama dalam menjabarkan variabel sumber daya. Seperti yang digunakan di dalam penelitian yaitu tenaga ahli, alokasi waktu dan besar dana. Berdasarkan hasil penelitian, di Kecamatan Samboja ketiga aspek tersebut sebenarnya sudah tersedia sehingga, sudah memenuhi aspek ketersediaan sumber daya. Namun, terdapat kendala dari tersebar informasi. Sumber daya di Kecamatan Samboja sebenarnya sudah ada namun terdapat perbedaan dengan Kecamatan Samboja yaitu di letak tenaga ahli serta alokasi waktu yang belum diketahui. Penyebaran informasi mengenai sumber daya juga masih minim. Disajikan peta nilai dimensi sumber daya yang berkaitan dengan upaya berdasarkan desa dan kelurahan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja. Nilai pada peta menunjukkan nilai di tiap desa dan kelurahan. Namun, secara keseluruhan nilai dimensi sumber daya yang berkaitan dengan upaya adalah 1.



Sumber: Olahan Penulis, 2020

Gambar 6. Peta Nilai Dimensi Sumber Daya yang Berkaitan dengan Isu

3.7 Penilaian Akhir Tingkat Kesiapan Masyarakat

Perhitungan tingkat kesiapan masyarakat mengenai pemindahan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja disajikan dalam ringkasan tabel *combined scores* yang menunjukkan total skor dari tiap dimensi pada Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja disajikan pada tabel 3

Tabel 3. Combined Scores

Tuber J. Combined Scores								
Kecamatan	camatan TOTAL		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
	Dimensi A	Dimensi B	Dimensi C	Dimensi D	Dimensi E	Dimensi		
						F		
Sepaku	386	499	211	375	405	231		
Samboja	220	350	229	345	378	124		

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Nilai total per dimensi kesiapan didapatkan dari hasil penjumlahan skor responden sesuai dimensi kesiapan. Dilakukan perhitungan skor gabungan menggunakan Total Dimensi A hingga Dimensi F yang dibagi dengan jumlah sampel responden yaitu 100 pada tiap kecamatan. Perlu diingat bahwa, pembulatan hasil dibulatkan kebawah. Didapatkan nilai *stage score* di tiap dimensi nya yang disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Stage Score

Total	Total	Total	Total	Total	Total	TOTAL Stage
Dimensi A	Dimensi B	Dimensi C	Dimensi D	Dimensi E	Dimensi F	Score
4	5	2	4	4	2	21
2	4	2	4	4	1	17

Sumber: Hasil Analisis, 2020

Nilai stage score menunjukkan total tiap dimensi kesiapan. Stage score digunakan untuk mengetahui kesiapan masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Dilakukan pembagian stage score dengan jumlah dimensi untuk mengetahui nilai akhir kesiapan masyarakat terhadap rencana pemindahan ibu kota negara. Hasil perhitungan dibulatkan kebawah Berikut merupakan perhitungan calculated score.

TOTAL Calculated Score = TOTAL = Stage Score ÷ 6 = Tingkat Kesiapan

TOTAL Calculated Score di Kecamatan Sepaku = $21 \div 6 = 3$ TOTAL Calculated Score di Kecamatan Samboja = $17 \div 6 = 2$ Nilai akhir kesiapan masyarakat Kecamatan Sepaku yaitu 3 atau *vague awareness*. Menurut Edwards, (2000) dan Plested, (2006), masyarakat dengan tahap kesiapan di tingkat 3 atau *vague awareness*, mulai tersadar adanya permasalahan namun, informasi mengenai isu masih minim, pemimpin tidak ada untuk memberikan motivasi dan mempengaruhi masyarakat. Sebagian besar kondisi tersebut sesuai dengan masyarakat Kecamatan Sepaku dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Terutama pada bagian peran pemimpin serta keterbatasan informasi. Menurut tabel interpretasi nilai tingkat kesiapan, masyarakat Kecamatan Sepaku sudah mulai terpikirkan mengenai upaya menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Masyarakat masih tidak peduli dengan hal tersebut. Masyarakat tidak tahu upaya mempersiapkan diri serta kelemahan dan kekuatannya. Sama sekali tidak ada pemimpin yang muncul dari masyarakat Kecamatan Sepaku sendiri sehingga, masyarakat tidak termotivasi dan tidak terpengaruh dalam mempersiapkan diri. Karena merasa tidak terkena dampak pemindahan ibu kota negara, masyarakat menjadi tidak peduli dan tidak ada usaha untuk mempersiapkan diri. Informasi yang diketahui oleh masyarakat adalah sebatas pemindahan ibu kota negara akan dilakukan di Kecamatan Sepaku dan tidak tahu mengakses sumber informasi *valid*.

Nilai akhir kesiapan masyarakat Kecamatan Samboja yaitu 2 atau denial/ resistance. Menurut Edwards, (2000) dan Plested (2006), masyarakat dengan tingkat kesiapan 2 hanya sedikit atau sama sekali tidak tahu mengenai isu yang terjadi akibat adanya pemikiran bahwa masalah tersebut bukan permasalahan dan adanya ketidak berdayaan. Hal ini sesuai dengan kondisi di Kecamatan Samboja terhadap kesiapan untuk menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara. Masyarakat di Kecamatan Samboja tidak berpartisipasi dalam upaya dikarenakan tidak ada upaya yang menjadikan masyarakat Kecamatan Samboja tidak peduli dalam mempersiapkan diri. Masyarakat Samboja sama sekali tidak tahu informasi mengenai upaya. Ketersediaan peran pemimpin dari masyarakat untuk menggerakkan masyarakat untuk mempersiapkan diri tidak diketahui sehingga, masyarakat Kecamatan Samboja tidak termotivasi dan terpengaruh dalam mempersiapkan diri. Masyarakat sama sekali tidak khawatir karena masyarakat sama sekali tidak tahu mengenai kepedulian atau kesadaran dalam mempersiapkan diri. Masyarakat sama sekali tidak tahu informasi valid pemindahan ibu kota negara.

Jika dibandingkan dengan penelitian serupa yaitu pada penelitian Delfiliana dan Dewi (2016), mengenai Kajian Tingkat Kesiapan Masyarakat Kawasan Tambak Lorok Terhadap Pengembangan Kawasan Wisata Bahari terdapat hasil yang menunjukkan lokasi yang memiliki tingkat kesiapan tinggi. Hal tersebut dikarenakan adanya keikutsertaan masyarakat terhadap kegiatan yang disediakan. Secara umum pengetahuan serta kemauan beradaptasi terhadap kondisi baru pun cukup tinggi sehingga, mampu mempengaruhi keikutsertaan masyarakat. Hal ini mampu meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi isu. Diketahui jika dikaitkan dengan penelitian kesiapan masyarakat dalam menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja, masyarakat dengan kondisi kesiapan rendah di akibatkan dari rendahnya pengetahuan mengenai informasi yang berhubungan dengan upaya dan rencana pemindahan ibu kota negara. Rendahnya pengetahuan berujung pada minimnya keikutsertaan dan kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu solusi yang ditawarkan oleh hasil penelitian Delfiliana dan Dewi (2016) adalah adanya intervensi guna meningkatkan tingkat kesiapan.

4. KESIMPULAN

Nilai akhir kesiapan masyarakat di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja tergolong rendah yaitu pada nilai 3 dan nilai 2. Walaupun kedua kecamatan memiliki kesiapan yang rendah, masyarakat Kecamatan Sepaku lebih siap daripada Kecamatan Samboja. Hal ini dikarenakan dari sebenarnya sudah tersedia kebijakan yang mendukung upaya untuk menghadapi rencana pemindahan ibu kota negara di Kecamatan Sepaku namun, di dalam penyebaran informasi nya masih kurang. Tingkat kesiapan di Kecamatan Sepaku dan Kecamatan Samboja keduanya berada di tingkat rendah sehingga, perlu dilakukan peningkatan kesiapan dengan mempertimbangkan hasil penelitian.

5. PERNYATAAN RESMI

Terimakasih dosen pembimbing utama, orang tua dan keluarga serta teman- teman yang memberikan semangat dan dukungan serta pihak instansi dan responden yang memberikan bantuan penyedian data dan kesediaan waktunya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2009), Pokok Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, Jakarta
- Blevins, Priscilla A. (2013). Use of The Community Readiness Model to Develop and Evaluate Cooking for Kids: Culinary Training for School Nutrition Professionals, Oklahoma University, Oklahoma
- Diskusi Lembaga Bumi. (2020). Ibu Kota Negara dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis, pemaparan diskusi
- Delfiliana, Fina dan Dewi, Diah Intan Kusumo. (2016). 'Kajian Tingkat Kesiapan Masyarakat Kawasan Tambak Lorok Terhadap Pengembangan Kampung Wisata Bahari'. Vol. 2, No. 3, hal 216: 224
- Editor (22 Desember 2019). Citing Internet sources URL https://punchng.com/abuja-transforming-from-nations-capital-to-mega-slum/amp/
- Edward, R. W. (2000). Community Readiness: Reserach to Practice. Jurnal of Community Psychology, https://doi.org/10.1002/(SICI)1520-6629(200005)28:3<291::AID-JCOP5>3.0.CO;2-9
- Illman, Erik. (2015), Reasons for Relocating Capital Cities and Their Implications. Tesis, Universitas Charles, Prague
- Hardika, Dihin Hikmat. (2013), Peran Pemimpin dalam Upaya Mempertahankan dan Meningkatkan Modal Sosial di Gapoktan Desa Semugih Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Hastuti, Hesty. (2011), Penelitian Hukum tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengaturan Tata Ruang. Tesis, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Kurniati, E., Meidiana, C. dan Wicaksono, A. (2015), 'Kajian Kesiapan Masyarakat Terkait Rencana Kegiatan Industri Pertambangan Marmer (Studi Kasus di Kelurahan Oi Fo'O, Kota Bima – NTB)', Vol. 4, hal : 18 - 27
- Lailia, Anita Nur. (2014). 'Gerakan Masyarakat dalam Pelestarian Lingkungan Hidup (Studi tentang Upaya Menciptakan Kampung Hijau di Kelurahan Gundih Surabaya)'. Vol. 3, No. 3, hal : 283-302
- Kecamatan Samboja (2020). 'Profil Kecamatan Samboja Tahun 2019', Samboja, Kutai Kartanegara
- Plested, Barbara A., Edwards, Ruth W., dan Thurman, Pamela Jumper. (2006), Community Readiness : A Handbook for Successful Change. Reading, Colorado State University, Colorado
- Putri, A. K. and Rahdriawan, M. (2017) 'Pengembangan Desa Wisata Kandri Berbasis Masyarakat', Vol.5, hal :160-173.
- Ramadhan, Pratama. (2016). 'Peran Kepemimpinan Lurah dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan', Universitas Riau, Pekanbaru